

Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa

Tuti Alawiyah*, Farhan Setiawan*

Magister Sosiologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Email:

tutialawiyah280187@gmail.com

Abstract

This article aims to answer problems related to the factors causing poverty in rural communities, how to eradicate poverty with local wisdom approaches, and how to empower rural communities in the poverty reduction process. The method in this study is to use a literature study. This study indicates that the factors that cause poverty in rural communities are as follows: regional conditions, weak economic growth, low education, inequality, a sense of dependence, and comfort in the zone. Poverty alleviation through local wisdom can be done by exploring natural resources and self-potential that exist in rural communities. Then the empowerment of rural communities in the poverty reduction process requires four principles: equality, participation, independence, and sustainability.

Keywords: *Poverty, Local Wisdom, Empowerment, Rural Communities*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat pedesaan, bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan kearifan lokal, dan bagaimana memberdayakan masyarakat pedesaan dalam proses penanggulangan kemiskinan. Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut: kondisi wilayah, pertumbuhan ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, ketimpangan, rasa ketergantungan, dan kenyamanan dalam zona. Pengentasan kemiskinan melalui kearifan lokal dapat dilakukan dengan menggali sumber daya alam dan potensi diri yang ada pada masyarakat pedesaan. Kemudian pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam proses penanggulangan kemiskinan membutuhkan empat prinsip: kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan.

Kata kunci: *Kemiskinan, Kearifan Lokal, Pemberdayaan, Masyarakat Pedesaan*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan sebuah problema utama yang ada di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejak masa berdirinya Indonesia hingga kini, kemiskinan masih menjadi masalah utama yang tak pernah habis untuk dikaji. Sebagai persoalan yang kompleks dan kronis, kemiskinan perlu melibatkan semua komponen permasalahan dalam menganalisisnya dalam menentukan strategi penanganan apa yang tepat dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam kebijakan dalam membuat strategi pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai program-program bantuan terhadap masyarakat miskin. Baik berupa bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, maupun program-program pemerintah lainnya dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah telah mengimplementasikan *Millenium Development Goals* (MDGs) hingga *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam proses pengentasan kemiskinan. MDGs yang berjalan dari tahun 2005 hingga 2015 dengan target mengurangi masalah sosial ekonomi 2015 hingga separuh dari kondisi kemiskinan tahun 2005. Dan berlanjut dengan SDGs yang berjalan dari tahun 2016 hingga tahun 2030, dengan target menghilangkan masalah sosial ekonomi untuk seluruh warga tanpa terkecuali, sehingga kemiskinan menghilang pada tahun 2030 yang akan datang.

Dari pengimplementasian MDGs, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pencapaian kemiskinan yang semula pada tahun 1990 adalah 20,60%, pada tahun 2008 turun sebanyak 5,90%. Dan pada tahun 2014 menunjukkan persentase penduduk mencapai 11,25% berada di

bawah garis kemiskinan secara nasional. Walaupun target belum tercapai, yaitu 7,55% namun kerja keras tersebut perlu kita apresiasi. Dan pada tahun 2016 disepakati SDGs meneruskan tujuan MDGs untuk kehidupan manusia lebih baik. (Admin 2020)

Pada laporan terbaru BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan jumlah penduduk Indonesia hingga 2021 mencapai 271.349.889 jiwa. Itu artinya jika dipresentasikan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 ini adalah 10,14 persen. Ada penurunan kemiskinan jika dibandingkan tahun 2015 yang lalu. (Admin 2021)

Berdasarkan dari indikator ekonomi secara teoritis, garis kemiskinan diukur menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara BPS menarik garis kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Sedangkan jika melalui pendekatan sosial masih sulit untuk mengukur garis kemiskinan masyarakat.

Berbicara terkait pengentasan kemiskinan, tentunya seluruh masyarakat mendambakan sebuah program yang ideal untuk semua wilayah. Program pengentasan kemiskinan yang ada seringkali disamaratakan untuk semua wilayah. Dan sayangnya seringkali program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini lebih terfokus pada program yang mengarah pada sasaran, akan tetapi mengabaikan potensi dan modalitas sosial masyarakat setempat, sehingga program tersebut tidak berjalan atau gagal. Kegagalan yang terjadi pun dikarenakan berbagai macam kondisi yang beragam.

Jika kita melihat dari tiga unsur modal sosial, yaitu kepercayaan, norma dan jaringan sosial, seringkali ada yang terabaikan dari salah satunya ketika program yang ada tengah berjalan. Entah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dikarenakan merasa pesimis dengan program yang tengah berjalan tersebut. Atau karena norma-norma yang diabaikan, seperti rasa individualistik yang muncul sehingga kurangnya rasa kebersamaan dan gotong-royong. Atau bahkan tidak adanya jaringan yang terbangun dengan baik antar masyarakat dan pemerintah. Hal-hal tersebut adalah bagian krusial yang harus mendapat perhatian lebih dalam menganalisis sebuah masalah sosial ekonomi dan bagaimana membuat sebuah kebijakan yang strategis dan tepat.

Kepercayaan adalah hal penting yang harus dimiliki antara masyarakat dan pemerintah. Karena kepercayaan adalah sebuah kunci dalam menjalankan roda pemerintahan, ketika kepercayaan sudah berada di tengah masyarakat, maka pemerintah harus bertanggung jawab penuh akan kepercayaan tersebut. Namun jika kepercayaan tersebut belum muncul di tengah masyarakat, maka tugas pemerintah untuk mengambil strategi dalam mengambil kepercayaan masyarakat. (Liata 2017).

Kemiskinan pada suatu wilayah dan strategi penyelesaiannya memang tidak dapat dipukul rata. Karena setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing baik dari segi sosial kulturalnya, peluang ekonomi maupun lingkungannya. Sehingga prinsip pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal perlu diperkuat dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Masyarakat di sini dijadikan sebagai subyek, bukan hanya sebagai obyek semata. Konsep

ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit. Prinsip ini senada dengan apa yang menurut Verhagen (1996) sebagai prinsip Keswadayaan, yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Dengan prinsip *“mulailah dari apa yang mereka miliki”* menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat (Maifizar 2016).

Rasanya tidak adil jika terus memfokuskan sebab kegagalan dikarenakan pemerintah. Karena kenyataannya, banyak yang terjadi di lapangan adalah mental masyarakatnya yang memang tidak ingin memperbaiki taraf kehidupannya lebih baik. Terutama di wilayah desa yang menjadi fokus kajian studi ini, bagaimana mental masyarakat miskin desa yang terbentuk selama ini adalah perasaan *“nrimo”* (menerima) apa yang ada dan apa yang terjadi pada dirinya, tanpa berpikir bagaimana memperbaiki kehidupannya yang sebenarnya telah berada pada masalah sosial ekonomi. Dan adanya prinsip hidup yang seringkali telah menjadi dasar filosofi dalam kehidupan masyarakat miskin desa, bahwa: *“yang didapat hari ini untuk dinikmati hari ini, untuk besok adalah urusan hari esok.”* Dan itu menjadi cara mereka menikmati hidup, tanpa memikirkan kerentanan apa saja yang akan terjadi di masa akan datang.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat desa, lalu bagaimana pengentasan kemiskinan dengan pendekatan kearifan

lokal, serta bagaimana pemberdayaan masyarakat desa dalam proses penanggulangan kemiskinan..

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya (Mardalis 1999). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan. (Nazir 1988).

Sumber data yang menjadi bahan dari penulisan artikel ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan topik yang telah dipilih terkait kemiskinan, pengentasan kemiskinan, dan masyarakat desa. Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini adalah dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. (Arikunto 2010). Sedangkan instrumen yang penulis gunakan adalah klasifikasi bahan penelitian, skema penulisan dan format catatan konsep penulisan.

C. Pembahasan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisik (pangan, sandang, papan) dan non-fisik (kesehatan, pendidikan dan rasa aman). Dalam penanganan kemiskinan diperlukan kemampuan pemerintah dalam membangun kerjasama

dengan berbagai pihak baik swasta, dunia usaha, masyarakat hingga negara lain yang telah berhasil dalam upaya penanganan kemiskinan. dan yang terpenting dalam pengentasan kemiskinan diperlukannya partisipasi masyarakat, sehingga modal sosial dan kearifan lokal masyarakat mampu mendukung penanganan kemiskinan. (Maifizar 2016).

Pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun perlu melibatkan masyarakat maupun pihak swasta. Maka diperlukan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, antar *stakeholder* yang berkaitan baik masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah maupun pihak yang dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, misalnya LSM.

Dalam pemberdayaan masyarakat miskin terdapat tiga pendekatan, antara lain: pendekatan terarah, pendekatan kelompok, dan pendekatan pendampingan. Pendekatan terarah adalah pemberdayaan masyarakat yang terarah dengan berpihak pada orang miskin. Sedangkan pendekatan kelompok dengan bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. Dan pendekatan pendampingan merupakan pendampingan dari pendamping profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat supaya cepat dalam mencapai kemandirian. (Lasmawan and Made Suryadi 2012).

Ketiga pendekatan di atas, sangatlah penting dan saling berkaitan satu dengan yang lain dalam proses pengentasan kemiskinan. Dalam pemberdayaan masyarakat, sebuah strategi sangat

diperlukan dengan terlebih dulu mengetahui persoalan yang menjadi sumber kemiskinan dan indikator apa saja yang digunakan dalam menentukan kemiskinan pada suatu wilayah. Sehingga dapat ditentukan bentuk pemberdayaan masyarakat seperti apa yang tepat. Selain itu, pendampingan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, supaya dapat dengan mudah mengevaluasi kegiatan yang berjalan dan terjalin jaringan yang baik antar pihak yang harus terlibat.

Jadi, sebelum menentukan sebuah strategi dalam pengentasan kemiskinan, diperlukan pula analisis dari kemiskinan itu sendiri. Baik sebab kemiskinannya, maupun indikator kemiskinan itu sendiri. Selain itu diperlukan pula dari berbagai pihak yang berkompeten untuk turut serta andil dalam langkah yang diambil. Hal tersebut untuk lebih mempertajam analisis dalam menentukan strategi penyelesaian persoalan kemiskinan yang tepat dan strategis.

1. Faktor Penyebab Kemiskinan Pada Masyarakat Desa

Nano Prawoto, merangkum definisi kemiskinan berdasarkan pada tiga pengertian, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, artinya tidak tercukupinya kebutuhan hidup minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan golongan miskin relatif berada di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Dan golongan miskin kultural berkaitan dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya walaupun ada pihak lain yang membantunya (Prawoto 2009)

Selain itu, kemiskinan bisa terjadi karena disebabkan oleh dua kondisi, yaitu: kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi dikarenakan bencana alam, sumber daya alam yang terbatas dan penggunaan teknologi yang rendah. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin. Hal tersebut terjadi disebabkan kebijakan pembangunan yang terfokus pada pertumbuhan daripada pemerataan. (Lasmawan and Made Suryadi 2012)

Dari jenis-jenis kemiskinan tersebut, memiliki masing-masing karakteristik dalam jenis kemiskinannya. Artinya, dalam penanganan masing-masing kemiskinan ini diperlukan cara yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya pada golongan miskin kultural, di mana persoalan golongan ini berkaitan dengan mental seseorang atau sekelompok masyarakat yang telah menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi dalam rentang waktu yang lama, tentunya dalam mengubahnya membutuhkan sebuah proses yang tidak sebentar. Karena pengentasan kemiskinan ini bukan sesuatu hal yang instan, namun sebuah proses untuk sebuah tujuan menjadi lebih baik.

Selain itu sebab kemiskinan dikarenakan kondisi pun berkaitan dengan ketiga kemiskinan tersebut. Karena setiap kemiskinan pada dasarnya ada sebabnya atau dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi. Misalnya kemiskinan absolut dikarenakan adanya bencana alam dan terjadinya hilangnya harta benda. Sehingga sandang, pangan, maupun papan tidak sanggup ia dapatkan. Begitu pula dengan kemiskinan relatif yang berpotensi muncul, karena adanya pertumbuhan ekonomi

yang tidak diimbangi dengan pemerataan. Selain itu karena struktur dan sistem yang ada menjadikan sebagian masyarakat tak mampu menguasai sarana ekonomi maupun fasilitas yang tersedia, sehingga ia tetap miskin meskipun berada di tengah-tengah wilayah perindustrian.

BAPPENAS mengeluarkan indikator kemiskinan dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, antara lain: (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintah yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat (Sahdan 2005).

Jika dilihat dari dimensinya, gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, antara lain: (1) Dimensi Politik; sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri sendiri. (2) Dimensi Sosial;

biasanya muncul dengan tidak terintegrasikannya masyarakat miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang menjadikan kualitas manusia dan etos kerja mereka rusak, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial. (3) Dimensi Lingkungan; sering kali muncul berbentuk sikap, cara pandang, dan perilaku yang tidak berorientasikan pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan untuk melaksanakan kegiatan yang kurang menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan. (4) Dimensi Ekonomi; seringkali hadir dengan bentuk rendahnya penghasilan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang layak tidak mampu. (5) Dimensi Aset; tampak dengan minimnya kepemilikan masyarakat miskin dalam berbagai hal yang bisa menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas human kapital, alat kerja, modal dana dan lain sebagainya (Waluyo 2006).

Dari pemaparan di atas, dapat kita temukan beberapa faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat desa pada umumnya, sebagai berikut:

- a. Kondisi wilayah mulai dari akses jalan yang masih buruk sehingga terisolasi dikarenakan letak geografis.
- b. Lemahnya pertumbuhan ekonomi, dikarenakan akses perekonomian yang jauh. Warga miskin akan kesulitan dalam menjual hasil pertanian ataupun hasil produksi lainnya.
- c. Rendahnya pendidikan yang menjadikan warga miskin di desa menjadi gaptek (gagap teknologi) dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga dalam pemasaran hasil produksi mengandalkan cara konvensional.

- d. Adanya ketimpangan, ketika sumber daya alam yang ada dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, di mana masyarakat desa tidak mendapat imbas dari hasil SDA tersebut.
- e. Rasa ketergantungan yang tinggi warga miskin terhadap bantuan dari pemerintah.
- f. Nyaman dengan zonanya, sehingga kurangnya kesadaran dalam mengubah taraf kehidupan yang lebih baik karena merasa cukup dan tidak ada yang kurang.

2. Pengentasan Kemiskinan Pendekatan Kearifan Lokal

Dari pemaparan analisis konsep kemiskinan yang telah dipaparkan sebelumnya, mulai dari golongan kemiskinan, sebab kemiskinan hingga indikator kemiskinan, dapat membantu untuk merencanakan strategi pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal yang disesuaikan pada kebutuhan dan karakteristik kemiskinan pada suatu wilayah. Selain itu, jika berpedoman pada program pengentasan kemiskinan saat ini, pemerintah berusaha untuk mengimplementasikan SDGs dalam setiap program.

Untuk menyeimbangkan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial, SDGs berpedoman pada 5 prinsip-prinsip dasar yang dikenal dengan 5 P, yaitu: (1) *People* atau Manusia. Prinsip pembangunan global dengan memposisikan manusia sebagai perhatian utama dalam pembangunan, serta pengentasan kemiskinan dan kelaparan sekaligus seluruh dimensi dan bentuknya. Prinsip ini juga perlu memastikan bahwa seluruh manusia mampu memenuhi kebutuhannya secara adil dan merata, serta hidup pada lingkungan yang baik. (2) *Planet* atau Bumi. Prinsip ini memfokuskan pada rencana perlindungan terhadap planet bumi dari segala bentuk kerusakan dan degradasi yang

merugikan, melalui konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, juga mengambil sikap penting dan strategis terkait perubahan iklim, sehingga bisa mendukung kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. (3) *Prosperity* atau Kesejahteraan. Prinsip yang memberi jalan pada pembangunan agar dapat memastikan semua manusia memposisikan kehidupan yang sejahtera dan layak, semua kebutuhan hidupnya tercukupi, baik secara ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan teknologi, dan tercipta harmoni atau selaras dengan alam. (4) *Peach* atau Perdamaian. Prinsip yang menunjukkan arah pada terbentuknya perdamaian dan keadilan, dan terciptanya masyarakat inklusif, yang bebas dari kekerasan dan ketakutan. Karena, tanpa perdamaian tidak akan ada pembangunan berkelanjutan, dan begitu pun sebaliknya. (5) *Patnership* atau Kemitraan. Prinsip ini bentuk strategi implementasi dan pencapaian rencana pembangunan berkelanjutan, dengan jalan memobilisasi, meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan banyak pihak termasuk dunia internasional, sehingga tercapai tujuan pembangunan global, khususnya tujuan pengentasan kemiskinan dengan partisipasi semua negara dan semua pemegang kepentingan lainnya. (Admin 2020)

Tiga pilar utama yang menjadi konsep pengembangan SDGs, yaitu: (1) pembangunan manusia (*Human Development*), sebagai contoh kesehatan dan pendidikan; Kedua, lingkungan sosial ekonomi (*Social Ekonomi Development*), berupa pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan sarana juga prasarana lingkungan; Ketiga, lingkungan (*Environmental Development*), seperti kualitas lingkungan yang sehat dan tersedianya sumber daya alam. (Admin 2020)

Dari lima prinsip dan tiga pilar SDGs tersebut, tampak jelas bahwa SDGs bertujuan untuk terciptanya kehidupan manusia yang lebih baik dalam bidang ekonomi dan sosial, dan bersinergi dengan lingkungan. Hal tersebut searah dan sejalan dengan pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal, di mana masyarakat miskin dijadikan subyek dalam proses pengentasan kemiskinan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitarnya dalam rangka mengembangkan menjadi nilai ekonomi dan membuka diri untuk menjalin kemitraan sehingga melatih kemandirian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama-sama.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang telah menyatu dengan kepercayaan, norma dan budaya dan diekspresikan dalam tradisi dalam waktu yang lama. Jadi, dalam strategi pengentasan kemiskinan di suatu wilayah diperlukan pemahaman mendalam tentang pola pikir masyarakat setempat dan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari hal-hal kecil di sekitar, yang terkadang malah diabaikan. Ataupun sebenarnya banyak dari kebiasaan-kebiasaan dari suatu masyarakat yang sesungguhnya adalah peluang besar untuk menaikkan perekonomian suatu wilayah.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal, antara lain: (1) Menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; (2) Komitmen global terhadap pembangunan sosial masyarakat adat sesuai dengan konvensi yang diselenggarakan oleh ILO; (3) Isu pelestarian lingkungan dan menghindari keterdesakan komunitas asli dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan; (4) Meniadakan marginalisasi masyarakat

asli dalam pembangunan nasional; (5) Memperkuat nilai-nilai kearifan masyarakat setempat dengan cara mengintegrasikannya dalam desain kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (Saharuddin 2009)

Memang untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, diperlukan kerja keras dari pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan usaha masyarakat untuk ikut andil bertanggung jawab dalam proses upaya pengentasan kemiskinan. diharapkan semua turut andil bagian tanpa ada terkecuali. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan tiga pilar, yaitu: sosio kultural, ekonomi, dan lingkungan.

Pendekatan sosio kultural dimaksudkan adalah usaha untuk mempertimbangkan aspek sosiokultural dan menggali nilai kultural serta pengetahuan lokal yang positif dalam masyarakat yang berguna dalam proses pengentasan kemiskinan. Sehingga proses yang dilakukan akan mengantarkan manusia sadar akan harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan pendekatan ekonomi penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. dan pendekatan lingkungan diharapkan dapat melestarikan lingkungan untuk generasi selanjutnya. (S, Nugrahani, and Rejeki 2015)

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah secara umum memiliki dua tujuan, yaitu: (1) mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, yang dibebankan kepada pihak lain seperti ke pemerintah atau masyarakat lainnya; (2) meningkatkan pendapatan penduduk miskin sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan. (Sudibia and Marhaeni 2012)

Dalam teori ekonomi, bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan dapat dilakukan peningkatan

keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Secara umum ada dua hal yang dapat dikembangkan dalam masyarakat desa dengan pendekatan kearifan lokal, yaitu:

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, bermanfaat dan dapat digunakan oleh manusia. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari alam untuk berlangsungnya hidup manusia. Bahkan dari alam dapat juga dimanfaatkan menjadi nilai ekonomi yang dapat menambah pendapatan sehingga mampu menaikkan taraf hidup. Seringkali alam yang ada di desa terbengkalai begitu saja, atau kurangnya pemanfaatan dari masyarakat. Penyebabnya bisa dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah, maupun kurangnya kepedulian masyarakat setempat.

Meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk berusaha bagi penduduk miskin. Kesempatan tersebut dapat diberikan melalui bentuk yang beraneka macam, termasuk pengembangan bidang pertanian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah pedesaan. (Zaini 2009)

Sebagai contoh, jika suatu wilayah tersebut berdekatan dengan pantai, hutan, gunung maupun keindahan alam lainnya, hal tersebut dapat dikelola menjadi tempat wisata alam. Dengan dukungan pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana, sedangkan masyarakat ikut serta dalam pengelolaannya. Dari sini akan didapatkan peningkatan perekonomian untuk masyarakat setempat.

Selain itu, pemanfaatan lahan kosong juga dapat dilakukan dalam program pengentasan kemiskinan. Lahan kosong yang ada,

dapat diberdayakan menjadi lahan untuk menanam jamu-jamuan, seperti: sereh, jahe, kunyit, sambiloto, dan lain-lain. Terutama dimasa pandemi seperti saat ini, ketika jamu-jamuan menjadi barang yang sangat dicari-cari untuk menjaga stamina. Sosialisasi pemanfaatan lahan kosong di sekitar rumah juga perlu digalakkan. Lahan kosong sekitar rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam aneka sayuran, maupun bumbu-bumbu dasar, seperti cabai dan bawang. Hal-hal kecil tersebut akan mampu mengurangi pengeluaran bagi masyarakat miskin untuk bahan-bahan dasar.

Jika kita gali lebih dalam, sangat banyak hal yang ada pada alam dapat dimanfaatkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Namun, yang paling penting untuk diperhatikan adalah kelestarian sumber daya alam yang ada, jangan sampai alam menjadi rusak karena adanya pengeksploitasian secara besar-besaran.

b. Potensi Diri

Potensi diri merupakan kemampuan seseorang yang tampak maupun yang belum tampak, namun belum digunakan secara maksimal. Potensi diri ini perlu digali dan diasah untuk mendapatkan hasil maksimal. Dalam menggali dan mengasahnya pun perlu adanya latihan secara terus menerus, dan diperlukan pula pendampingan. Pengembangan potensi diri ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia.

Upaya meningkatkan potensi diri diyakini mampu dapat menurunkan tingkat kemiskinan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk maju dan berkembang lebih besar. Selain itu, pengembangan potensi diri dalam upaya meningkatkan kualitas

sumber daya manusia menjadi investasi masa depan. Yang mana dari potensi diri ini yang akan bermanfaat dalam pengelolaan sumber daya yang ada, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. (Zaini 2009)

Contoh dari potensi diri ini yang dapat dimanfaatkan dalam pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal pada masyarakat desa misalnya, perajin batik atau tradisi memproduksi batik, perajin perak, kerajinan ukiran, dan lain sebagainya. Dari berbagai potensi tersebut dapat pula dikembangkan menjadi wisata budaya, yang khas dengan Indonesia akan budayanya yang kaya. Selain itu, potensi diri juga dapat ditemukan pada bidang jasa. Misalnya jasa potong rambut dan jasa tukang pijat yang sering dibutuhkan pada semua masyarakat, termasuk masyarakat desa.

Kearifan lokal yang berkaitan dengan potensi diri ini lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Namun, sesungguhnya terdapat proses *transfer of knowledge* yang berlangsung secara alami. Tanpa ada pelatihan formal pun, keahlian dalam bentuk kearifan lokal akan terus ada. Dan kini telah diperkuat dengan pelatihan formal yang sudah mulai diselenggarakan oleh pemerintah.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu tujuan pembangunan masyarakat adalah mendorong terjadinya perubahan dan pembiasaan warga dari penerima pembangunan dan pelayanan (pasif) menuju warga yang kapabel dan berpartisipasi (aktif) menentukan pilihan, menangani isu bersama dalam masyarakat. Pendekatan ini sebagai paradigma pembangunan berpusat manusia (*people centered development*) yang menempatkan

masyarakat sebagai fokus maupun sumber utama pembangunan. Pendekatan itu dipandang sebagai suatu strategi alternatif yang menjamin komplementaritas dengan pembangunan bidang lain. Orientasinya adalah pada pertumbuhan kualitas, mendorong kemampuan, dan kapasitas warga masyarakat terlibat dalam keputusan penting menyangkut kehidupannya. (Saharuddin 2009)

Pembangunan masyarakat dipahami melalui tiga orientasi, yaitu: (1) upaya pengadaan pelayanan dasar sebagai kelengkapan dari strategi kebutuhan pokok, diidentikkan dengan peningkatan pelayanan sosial dan pemberian fasilitas sosial, seperti fasilitas kesehatan, peningkatan gizi, pendidikan, dan sanitasi untuk kesejahteraan masyarakat; (2) upaya terencana untuk mencapai tujuan lebih kompleks dan bervariasi, guna mencapai tujuan sosial yang lebih sulit diukur, seperti keadilan, pemerataan, peningkatan budaya, kedamaian, serta adanya kesempatan yang sama; dan (3) upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat dan meningkatkan potensialitasnya, memobilisasi antusiasmenya untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan terkait dengan diri mereka. (Tjokrowinoto 1987)

Dalam mencapai keberhasilan pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal, diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat ikut serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lainnya, terlibat dalam proyek, serta lebih banyak akan mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam lingkungannya. Masyarakat juga akan mampu mengembangkan diri menuju kemandirian ekonomi dengan proteksi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, dibutuhkan keterlibatan sektor swasta sesuai kadar tanggung

jawabnya, maupun LSM yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan sosial. Biasanya mereka akan mendorong pemerintah agar responsif terhadap problematika masyarakat (Tjokrowinoto 1987)

Namun kebijakan penanggulangan kemiskinan juga perlu didasari atas persepsi tentang faktor-faktor penyebab dan dimensi kemiskinan itu sendiri. Jika penyebabnya ada pada diri manusianya atau kelompok miskin, misalnya aspek budaya tidak mau bekerja keras, maka kebijakannya adalah memotivasi mereka untuk bekerja keras agar dapat mandiri. Dalam hal ini pemerintah tidak mengintervensi pasar tetapi membiarkan sistem pasar bebas berlangsung apa adanya. Penduduk miskin itu sendirilah yang harus menyelesaikan sendiri masalah kemiskinannya. Memberikan bantuan material hanya mengakibatkan ketergantungan terus menerus sehingga tidak akan pernah mandiri. (Pattinama 2009)

Pemberdayaan masyarakat ini bermanfaat dalam pengembangan sumber daya alam maupun potensi diri, terutama dalam hal jangkauan pasar. Awalnya tentu pasar mereka hanya jangkauan tingkat lokal, sebatas kebutuhan masyarakat setempat, yang kemudian berkembang pada desa-desa tetangganya. Namun, jangkauan ini akan semakin meluas dengan adanya pembinaan yang intensif, dengan cara sebagai berikut: (1) pemasaran melalui media, dengan pelatihan sosial media yang memadai supaya masyarakat miskin melek akan teknologi, terutama dalam pemasaran kearifan lokal yang mereka miliki; (2) bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti para pemuda setempat, koperasi guna kelancaran modal, maupun *stakeholder*; (3) membangun jaringan. Maka hal tersebut diperlukan partisipasi *stakeholder* dalam hubungan yang efektif antara

masyarakat dan pemerintah, supaya komunikasi berjalan dengan lancar yang akhirnya tujuan yang diharapkan tercapai.

Konsep pemberdayaan masyarakat ini berpusat pada rakyat. Di mana inisiatif kreatif dari rakyat menjadi dasar kebijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil dalam pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menstimulasi kemandirian masyarakat secara partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Maka diperlukan pendamping dengan komitmen tinggi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam program pemberdayaan, terdapat empat prinsip yang sering digunakan, yaitu: kesetaraan, partisipasi, keswadayaan / kemandirian, dan keberlanjutan. (Maifizar 2016)

Dengan *kesetaraan*, diharapkan tidak adanya kesenjangan antara masyarakat dan penyelenggara program, maupun terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dalam *partisipasi*, diharapkan masyarakat ikut andil dalam menentukan pilihan, berpikir kreatif, dan ikut memikul tanggung jawab atas segala konsekuensi dari pilihan yang diambil. Dari *keswadayaan / kemandirian*, diharapkan masyarakat mampu untuk mengorganisir dan menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa adanya ketergantungan pada bantuan yang terus-menerus. Dan *keberlanjutan* program dapat dikelola sendiri kegiatannya oleh masyarakat tanpa adanya peran pendamping lagi.

Dengan dijalankannya keempat prinsip dalam pemberdayaan tersebut secara konsisten, bukanlah hal mustahil jika kemiskinan perlahan akan berkurang dan kualitas masyarakat akan semakin baik. Karena pada dasarnya kesadaran dalam diri individu itu sendiri yang

akan mengubah kondisi dari seseorang, yang lambat laun akan mengubah masyarakat secara umum.

D. Penutup

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang selalu menjadi hal menarik untuk dikaji, terutama kemiskinan pada masyarakat desa. Dalam kajian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat desa meliputi: (1) kondisi wilayah; (2) lemahnya pertumbuhan ekonomi; (3) rendahnya pendidikan; (4) adanya ketimpangan; (5) rasa ketergantungan; (6) nyaman dengan zonanya. Dari sebab kemiskinan tersebut, maka diperlukan strategi dalam pengentasan kemiskinan. Strategi tersebut dengan pendekatan kearifan lokal, di mana program yang diberikan mengacu pada sosio kultural, peluang ekonomi dan lingkungan masyarakat desa tersebut. Sehingga didapatkan pendekatan kearifan lokal dengan menggali sumber daya alam dan potensi diri yang ada pada masyarakat desa tersebut. Selanjutnya, dalam menggali kearifan lokal tersebut, dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat dengan berprinsip pada empat hal, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan / kemandirian, dan keberlanjutan. Dengan empat prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut, diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang kreatif dan mau ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan juga bertanggung jawab serta mampu mengelola segala permasalahan ke depannya tanpa adanya ketergantungan. Sehingga lambat laun kemiskinan akan menghilang dengan kesadaran dari diri tiap individu.

Daftar Pustaka

- Admin. 2020. "Dari MDGs Ke SDGs." <https://Sdgsdesa.Kemendesa.Go.Id/Dari-Mdgs-Ke-Sdgs/>.
- Admin. 2021. "Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 Turun Menjadi 10,14 Persen." <https://Www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2021/07/15/1843/Persentase-Penduduk-Miskin-Maret-2021-Turun-Menjadi-10-14-Persen.Html>.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Krippendoff, Klaus. 1993. *Analisis Isi : Pengantar Teori Dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.
- Lasmawan, I. Wayan, and Made Suryadi. 2012. "Pengembangan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai-Nilai Nyamabraya (Ajaran Tatwamasi) Pada Masyarakat Perkotaan Di Provinsi Bali." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol.1, No.
- Liata, Nofal. 2017. "Pola Hubungan Pertukaran Sosial Saling Menguntungkan Antara Partai Politik Dengan Masyarakat." Universitas Sebelas Maret.
- Maifizar, Afriani. 2016. "Karakteristik Dan Fenomena Kemiskinan Keluarga Miskin Pedesaan Di Aceh." *Jurnal Community* Vol. 2, No.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pattinama, Marcus J. 2009. "Pengentasan Kemiskinan Dengan KEarifan Lokal (Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku Dan Surade-Jawa Barat)." *Jurnal Makara, Sosial Humaniora* Vol. 13, N.
- Prawoto, Nano. 2009. "Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* Vol. 9, No.
- S, Rosalia Indriyati, Tri Siwi Nugrahani, and Sri Rejeki. 2015. "Pendekatan Tiga Pilar Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Berspektif Gender." *Jurnal PKS* Vol 14, No.
- Saharuddin. 2009. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis

- Kearifan Lokal." *Jurnal Transdidiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia* Vol. 3, No.
- Sahdan, Gregorius. 2005. "Menanggulangi Kemiskinan Desa." *Artikel-Ekonomi Rakyat Dan Kemiskinan*.
- Sudibia, I. Ketut, and Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni. 2012. "Beberapa Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali." *Piramida* Vol. IX, N.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis, Konsep Arah Dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Waluyo, Dwi Eko. 2006. "Studi Tentang Bentuk Kemiskinan Penduduk Di Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kab. Bondowoso." *Humanity* Vol. 1, No.
- Zaini, Ahmad. 2009. "Kemiskinan Di Daerah Kaya Sumberdaya Alam, Sebuah Paradoks Pembangunan." *Jurnal Borneo Administator* Vol 1. No.